

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia stunting merupakan masalah kesehatan yang terjadi pada balita yang dari tahun ke tahun angka kenaikannya masih tinggi sehingga masalah ini pun menjadi fokus oleh pemerintah tentang bagaimana cara mencegahnya dan bagaimana cara menanggulangi stunting tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan mengapa permasalahan stunting dari tahun ketahun ini semakin banyak, seperti pola lingkungan yang tidak bersih, dan yang paling umum ialah kurangnya asupan gizi pada saat balita, sehingga mengakibatkan pola pertumbuhan pada anak sangat kurang.

Menurut survei yang dilakukan oleh Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) yang dilakukan pada tahun 2021, jumlah kasus permasalahan stunting sekitar 5,33 juta balita atau sekitar 24,4%. Akan tetapi permasalahan penderita stunting yang terjadi pada balita ini dari tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan. Maka dari itu, pada tahun 2024 Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting dari 24,4% menjadi 14% (Kemenpokmk, 2022).

(Calista et al., 2021) dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana permasalahan stunting terhadap perkembangan motoric halus pada balita. Penelitian tersebut menyatakan bahwa permasalahan stunting dan perkembangan motoric halus pada balita mempunyai hubungan yang sangat signifikan, terdapat 40% balita yang tidak mengalami stunting serta 52% perkembangan motoric halus yang tidak sesuai dengan usianya.

Permasalahan mengenai stunting disini menjadi fokus utama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman (Susmayanti, 2022). Selanjutnya telah dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Program Percepatan Penanggulangan Stunting. Kemudian pada Tahun 2021 telah diubah menjadi Perbup Nomor. 22.1 Tahun 2021 mengenai penanggulangan stunting yang terintegritas yang berarti terpadu atau secara bersama-sama menjadi satu kesatuan yang utuh menuju tujuan bersama (D. Sleman, 2022). Upaya perbaikan gizi terintegrasi yaitu serangkaian kegiatan perbaikan gizi yang dilakukan secara terpadu, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat baik dalam bentuk upaya promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat (Amelia, 2021). Akan tetapi ruang lingkup yang peneliti lakukan lebih berfokus pada Perbup Nomor. 22.1 Tahun 2021 mengenai penanggulangan stunting yang terintegritas.

Berikut dibawah ini adalah table persentase data angka stunting di Kabupaten Sleman dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 1.1
Angka Stunting tahun 2018, 2019 dan 2020

No	Tahun	Jumlah Presentase
1.	2018	11,00%
2.	2019	8,38%
3.	2020	7, 24%

Sumber: www.slemankab.go.id

Pada tahun 2018 jumlah data stunting jumlah presentase sebesar 11,00% selanjutnya pada 2019 turun kembali sebanyak 8,38%, dan pada tahun 2020 turun kembali menjadi 7, 24% (Slemankab, 2022). Pada tahun 2019 Dinas Kabupaten Sleman berkolaborasi bersama dengan Politeknik Kesehatan

Kementrian Kesehatan Yogyakarta menyelenggarakan untuk menganalisis faktor faktor yang menyebabkan terjadinya stunting yang dilakukan di titik 7 wilayah puskesmas yakni terdiri dari Pakem, Kalasa, Minggor, Godean 1, Ngaglik 1, Ngemplak 1 dan Moyudan. Dari hasil analisis tersebut terdapat faktor seperti keluarga yang memiliki penghasilan rendah dengan memperoleh persentase sebanyak 65,6% bayi yang memiliki kekurangan badan pendek dengan memperoleh sebanyak 66% balita yang tidak melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) memperoleh persentase sebanyak 21,9% serta balita yang sudah diberi makan dan minum yang kurang dari tiga hari memperoleh persentase sebanyak 21,7% (D. K. K. Sleman, 2020).

Terkait dengan melakukan penanggulangan stunting perlu adanya tindakan yang bersifat efektif dan efisien yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti intervensi gizi yang terbagi menjadi dua bagian. Pertama, intervensi gizi yang spesifik dengan memiliki kontribusi sekitar 30%, kedua intervensi gizi sensitive dengan memiliki kontribusi yang besar sekitar 70%, akan tetapi untuk kategori gizi sensitive pada dasarnya sasarannya adalah masyarakat umum dengan tanpa terkecuali dengan melakukan kegiatan seperti pembangunan dalam bidang non kesehatan meliputi penyediaan air bersih, penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender, dll (Ch Rosha et al., 2016).

Pemerintah Kabupaten Sleman membuat sebuah inovasi dalam rangka pencegahan stunting di Kabupaten Sleman yang dikemas melalui program Pecah Ranting Hiburane Rakyat atau Pencegahan Rawan Stunting yang ditetapkan Perbup Nomor 27 Tahun 2019 terkait dengan program percepatan penanggulangan

stunting. Inovasi Program Pecah Ranting ini merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka penanggulangan stunting dengan melakukan pemberian Penyaluran Makanan Tambahan (PMT) kepada ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dan balita kurang gizi (Yani, 2020).

Program penanggulangan stunting ini dikemas melalui kolaborasi antara Dinas Kesehatan sebagai leading sektor dengan Dinas Sosial sebagai pemilik anggaran untuk pembiayaan serta para *stakeholder* yang ikut serta terlibat dalam program Pecah Ranting tersebut (D. Sleman, 2022).

Dalam menjalankan sebuah kolaborasi tentulah banyak *stakeholder* yang terlibat. Terdapat beberapa aktor yang terlibat seperti akademisi, pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah

Kolaborasi yang dilakukan dalam penanganan stunting di Kabupaten Sleman melibatkan pihak pemerintah. Terdapat beberapa pihak dari pemerintah yang terlibat seperti Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian Pangan, dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian Agama, Dinas Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Badan Pusat Statistika.

2. Swasta

Kolaborasi yang dilakukan dalam penanganan stunting di Kabupaten Sleman melibatkan pihak swasta. Terdapat beberapa pihak bisnis/swasta yang terlibat seperti Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI), CSR Sleman.

3. Organisasi/Komunitas

Kolaborasi yang dilakukan dalam penanganan stunting di Kabupaten Sleman melibatkan pihak masyarakat seperti karang taruna, lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK), pos pelayanan terpadu (posyandu), kader pembangunan manusia (KPM), Pemberdayaan Kesajahteraan Keluarga (PKK)

4. Akademisi

Kolaborasi yang dilakukan dalam penanganan stunting di Kabupaten Sleman melibatkan pihak akademisi Universitas Gajah Mada, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Stikes Panti Rapih, Poltekes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Gizi. Universitas Respati Yogyakarta.

5. Media

Kolaborasi yang dilakukan dalam penanganan stunting di Kabupaten Sleman melibatkan pihak media seperti Bernas, Harian Jogja (Harjog), Jawa Pos, Kedaulatan Rakyat, Kompas, Pikiran Rakyat, Radar Jogja, Radio Republik Indonesia, Republika, The Jakarta Pos, Yogya Post, TVRI.

Dengan adanya *Collaborative Governance* ini terdapat beberapa pencegahan dan penanggulangan seperti melakukan pendataan khusus untuk

kelompok yang rentan melahirkan balita stunting yaitu ibu hamil yang memiliki kategori kekurangan energi kronis (KEK) serta kategori balita yang rentan memiliki kekurangan gizi, lalu setiap ibu hamil yang termasuk dalam kategori KEK mendapatkan pendampingan melalui edukasi bahaya terhadap pengidap ibu hamil KEK dan bagaimana cara mengatasinya serta akan didampingi konsultasi terhadap pakar yang terkait, lalu dilakukan pemberian makanan tambahan (PTM) seperti telur fungsional untuk meningkatkan imunitas tubuh, kearifan lokal dan PMT dari Kementerian Kesehatan RI, serta menetapkan regulasi Pemerintah Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut ikut serta melibatkan peran dana desa (Yani, 2020). Setelah ketiga program tersebut berjalan maka pemerintah akan memantau secara terus menerus secara intensif.

Dalam program Pecah Ranting terdapat dua kategori yang termasuk dalam pencegahan stunting yaitu Ibu Hamil dan Balita. Pencegahan yang dilakukan untuk ibu hamil yang termasuk dalam kategori Kekurangan Energi Kronis (KEK) akan dilakukan penyuluhan bahaya KEK dan cara mengatasinya serta bahaya bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram (BBLR) serta stunting, lalu menghimbau untuk ibu hamil mengkonsumsi makanan yang bergizi dengan memberikan telur fungsional 2 butir perhari yang dilakukan selama 90 hari yang didampingi oleh kader, lalu ibu hamil mendapatkan pengarahan untuk melakukan posyandu dengan pemantauan berat badan setiap bulan.

Kategori selanjutnya program Pecah Ranting untuk Balita dilakukan pencegahan stunting seperti melakukan pengarahan pendampingan oleh Puskesmas atau perangkat Kecamatan dan Desa kepada Ibu Balita untuk memperoleh edukasi

mengenai bahayanya balita kurang gizi yang tidak tertanggulangi, lalu mendapatkan pemantauan secara intensif pada status gizi buruk oleh kader pendamping untuk mendapatkan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada PAUD, TK, TPA.

Namun disamping berjalannya program Pecah Ranting ini tentu terdapat permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan, maka hal ini dapat mempengaruhi terhambatnya suatu keberhasilan *Collaborative Governance*. Terdapat beberapa permasalahan seperti kurangnya koordinasi pemerintah dengan *stakeholder* terkait dengan terjadinya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat, lalu terdapat pola asuh kepada anak yang kurang baik dengan kondisi lingkungan yang sehat dan kurangnya pengetahuan terhadap teknologi.

Dengan adanya pencegahan dan penanggulangan yang telah dilakukan pada tahun tahun sebelumnya, terbukti adanya penurunan angka stunting dari tahun 2018-2020 walaupun memang masih ada beberapa faktor penghambat dan permasalahan ketika program ini berlangsung, maka diharapkan pada penelitian ini bisa memecahkan permasalahan dalam kategori penghambat dan permasalahannya.

Dengan adanya latar belakang tersebut, mengenai pencegahan dan penanganan tersebut karena memang isu yang ini sedang menjadi isu nasional terutama di Kabupaten Sleman dalam pencegahan dan penanganan stunting yang dikolaborasikan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial serta *Stakeholder* yang terlibat sangat memfokuskan program pencegahan tersebut dan menghasilkan angka penurunan stunting dan terbukti terdapat beberapa penurunan angka stunting dari tahun 2019 memperoleh 8,38% dan di tahun 2020 turun menjadi 7,24%

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang di ambil adalah

1. Bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam menciptakan pencegahan dan penanggulangan di Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam menciptakan pencegahan dan penanggulangan di Kabupaten Sleman?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya pada bidang *Collaborative Governance*.
2. Dari hasil temuan ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan peningkatan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sleman, khususnya dalam hal *Collaborative Governanvce*.
3. Penelitian ini menjadikan bahan kajian bagi para peneliti dalam menangani *Collaborative Governance* dalam bidang stunting.

1.4.2. Manfaat Praktis:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana dalam pemanfaatam serta pengimplementasian penulis terkait Strategi *Collaborative Governance* dalam pencegahan dan penanganan stunting.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi alternatif bagaimana cara pencegahan dan penanganan stunting.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kembali inovasi dalam *collaborative governance* dalam pencegahan dan penanganan stunting.

4. Bagi Swasta

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam *Collaborative Governannce*, serta memberikan masukan atau rekomendasi kepada pihak pemerintah terhadap *Collaborative Governance* dalam pencegahan dan penanggulangan stunting.

5. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam *Collaborative Governannce*, serta memberikan masukan atau rekomendasi kepada pihak pemerintah terhadap *Collaborative Governance* dalam pencegahan dan penanggulangan stunting.

1.5 Tinjauan Pustaka

Studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan *Collaborative* di Indonesia dapat dipetakan/dikategorikan/diklasifikasian (taksonomi) sebagai berikut:

Tabel 1.2. Tinjauan Pustaka

Penulis	Judul	Hasil Temuan
(Suwardi Zakaria, 2021) Jurnal Of Tompotika: Social, Economics, and Education Science (JTSEES) Vol. 3 No. 05(2020) https://jtsees.untika.ac.id/index.php/jtsees/article/view/57	Collabprative Governance Dalam Upaya Pencegahan Stunting di Kabupaten Baggai	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Collaborative Governance</i> dalam pencegahan stunting di kabupaten Baggai ini berkolaborasi dengan sepuluh aktor yakni Dinas Kesehatan, Bappeda dan Litbang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Disdukcapil, Diskominfo dan Dinas PPKBP3A • Penelitian menggunakan teori De Seve (dalam sudarmo, 2011) • Hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan <i>Collaborative Governance</i> dalam pencegahan stunting di Kabupaten Baggai dari hasil data kuesioner pada 8 sub variabele dan 14 kategori sehingga presentasinya mencapai 87,1% dengan hasil kategori sangat baik, sedangkan hasil pada wawancara dan observasi belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.
(Chaerunissa, 2020) Journal Of Public Policy And Management Review (Vol 10, No.2) https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/30594	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Penanggulangan Stunting di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemasang	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan teori Ansell dan Gash • Terdapat 2 tim yaitu tim intervensi spesifik yang dikendalikan oleh Dinas Kesehatan, daan intervensi sensitive yang tidak berhubunagn secara langsung dimana me,ibatkan sektor lain selain sektor kesehatan • Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan terdapat ketidakseimbangan

Penulis	Judul	Hasil Temuan
		sumberdaya baik dari segi manusia dan keuangan, seperti partisipasi masyarakat dalam pembentukan kader stunting yang masih rendah.
(Saufi, 2021) (Vol.1 No.1) file:///C:/Users/acer/Downloads/40-80-2-PB%20(2).pdf	Dinamika Collaborative Governanve dalam penanggulangan Stunting ditengah Pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan model <i>Collaborative Governance</i> dari Emirson (2013) • Keterlibatan dalam Penanggulanagn Stunting di Jawa Timur ini melibat beberapa aktor yakni Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta, dan Oragnisasi Masyarakat. • Dari hasil penelitian tersebut menunjukan masih terdapat kesenjangan dari pemerintah yang kurangnya aksi yang ditunjukkannya, serta lemahnya aturan hukum tentang kewajiban stakeholder dan aktor yang terlibat
(Megawati & Wiramihardja, 2019) Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat (Vol.8, No.3 2019) http://jurnal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/view/20726/0	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dalam mendeteksi dan mencegah Stunting di Desa Cipancing Jatinangor	Hasil dari penelitian menjelaskan KKNM yang dilakukan oleh Unpad melakukan pelatihan peningkatan kapasitas kader posyandu dalam rangka pencegahan stunting, lalu dengan adanya pelatihan tersebut bisa mengehui dan mengindentifikan faktor apa yang menyebabkan adanya stunting di Desa Cipacing.
(Sukanti & Faidati, 2021) Jurnal Caraka Prabu (Vol 5 No 1 2021) file:///C:/Users/acer/Downloads/418-Article%20Text-1559-1-10-	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman	Hasil dari penelitian tersebut menunjukan <i>Collaborative Governance</i> dengan menggunakan pengukuran dinamika kolaborasi dalam pelaksanaannya sudah cukup baik, akan tetapi terdapat beberapa faktor penghambat pada saat program tersebut berjalan yakni

Penulis	Judul	Hasil Temuan
20210603%20(1).pdf		belum tersedianya forum komunikasi.
(Supriyatni et al., 2021) Jurnal Biosaintek (Vol 3 No.2 2021) http://www.jurnal.ummu.ac.id/dharmakarya/article/view/20726/0	Kolaborasi Cegah Stunting dengan Mempersiapkan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) pada Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Perawatan Jambula	Hasil dari penelitian tersebut terdapat peningkatan pengetahuan mengenai bagaimana cara mengetahui bentuk penyebab stunrung dan cara pencegahannya melalui program persiapan 1000 HPK, kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara masyarakat dan lembaga dalam rangka menurunkan angka stunting pada balita.
(Tome & Dunga, 2022) Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Vol 1 No. 1 2020) file:///C:/Users/acer/Downloads/8257-19761-1-PB%20(1).pdf	Penanganan Stunting Melalui Konsep Gerbos Emus	Hasil dari penelitian tersebut program pelatihan dan pembentukan Gerbos Emas menjadi peencegahan baru dalam penanganan stunting yang tidak hanya pengembangan infrastuktur tetapi juga sebagai ujung tombak pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesehatan masyraakat di pedesaan.
(Nugroho et al., 2019) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Vol 1, No. 1 2020) https://jpt.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/be-guaijajama/article/view/15	Pendampingan, Penyuluhan, Praktek Pembuatan Mp-Asi Dalam Rangka Pencegahan Stunting Melalui Pendekatan Gizi 1000 HPK Di Wilayah Kerja Dinkes Pesawaran	Hasil dari penelitian tersebut terdapat penigkatan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat MP-ASI dengan lokal berdasarkan hasil observasi pelaksanaan pengabdian masyarakat. Perlunya pelatihan serupa yang dilakukan oleh pengabdian masyarakat untuk meningkatkan jumlah kader kemitraan dalam pendampingan ibu hamil. Lalu perlu dilakukan kajian khusus terkait denga pola asuh dan sanitasi lingkungan setempat dalam pelaksaan pengabdia kepada masyarakat.
(Wiyono et al., 2021)	Prosiding	Hasil dari penelitia tersebut

Penulis	Judul	Hasil Temuan
Journal Poltekkes Tasikmalaya (Vol 1 No. 2 2021) http://ejurnal.poltekkes.tasikmalaya.ac.id/index.php/Pengmas/article/view/826	Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya	terdapat peningkatan pengetahuan serta sebuah inovasi tindak lanjut dari peserta pelatihan yang sudah mengikuti kunjungan kerumah orangtua balita stunting untuk memberikan edukasi sebagai pengimplementasian hasil dari penelitian.
(Purwitasari et al., 2020) Jurnal Pengabdian Masyarakat DEDIKASI (Vol 1 No.1 2020) https://dedikasi.lp4ms.tikeskhg.org/index.php/home/article/view/11	Pemberdayaan Kader Melalui Mini Workshop Gizi Pada Ibu Hamil Dalam Upaya Pencegahan Stunting	Hasil dari penelitian tersebut terdapat peningkatan pengetahuan tentang masalah gizi dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulanagn Stuting melalui pembedayaan kader kesehatan yang perlu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pencegahan stunting di 1000 hari pertama kehidupan.

Namun demikian studi-studi dan penelitian-penelitian terdahulu terdapat faktor penghambat dari aktor utama yakni pemerintah seperti yang dikatakan oleh (Saufi, 2021) dalam sebuah penelitiannya bahwa terdapat faktor penghambat dari pemerintah berupa kurangnya aksi yang ditunjukkan, serta lemahnya regulasi tentang kewajiban stakeholder yang terlibat. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh (Megawati & Wiramihardja, 2019) terdapat peningkatan pengetahuan yang dilakukan oleh KKNM Unpad dalam melakukan *Collaborative Governance* dalam upaya pencegahan stunting.

Selain itu penelitian *Collaborative Governance* yang dilakukan oleh (Supriyatni et al., 2021) terdapat peningkatan pengetahuan tentang bagaimana memahami faktor terjadinya stunting. Lalu penelitian yang dilakukan oleh (Sukanti

& Faidati, 2021) hasil penelitian tersebut menunjukkan *Collaborative Governance* dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman dengan menggunakan teori pengukuran dinamika *collaborative* menunjukkan hasil yang sudah cukup baik, akan tetapi terdapat beberapa faktor penghambat yang menunjukkan bahwa kurangnya forum komunikasi yang disediakan.

Perbedaan penelitian ini bersifat melengkapi dengan menghasilkan beberapa temuan baru yang sebelumnya tidak ditemukan di penelitian sebelumnya dengan berfokus pada proses *Collaborative Governance* yang diukur menggunakan teori Ansell dan Gash yakni *face to face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, intermediate outcome*. Selain itu, penelitian ini juga menghadirkan penjelasan tentang *stakeholders* dan perannya serta regulasi-regulasi yang mendukung pelaksanaan kolaborasi. Semua materi tersebut menjadi satu kesatuan untuk menjelaskan pelaksanaan *Collaborative Governance* secara lebih rinci dan komprehensif.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1. Collaborative Governance

Definisi *Collaborative Governance* menurut (Ansell & Gash, 2008) *Collaborative Governance* merupakan suatu susunan pemerintahan, terdapat instansi publik yang lebih dari satu yang berhubungan dengan *stakeholder* non pemerinrah secara langsung dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga berorientasi pada konsensu, deliberatif dan menuju pada formulasi atau implementasi kebijakan publik, atau dalam manajemen program atau asset public.

Sedangkan menurut teori (Joo Chang, 2009) *Collaborative Governance* pada dasarnya telah terdapat banyak penekanan pada kolaborasi sukarela serta hubungan horizontal antara partisipan *multisector*, karena tuntutan dari klien sehingga sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, sehingga membutuhkan interaksi antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan public.

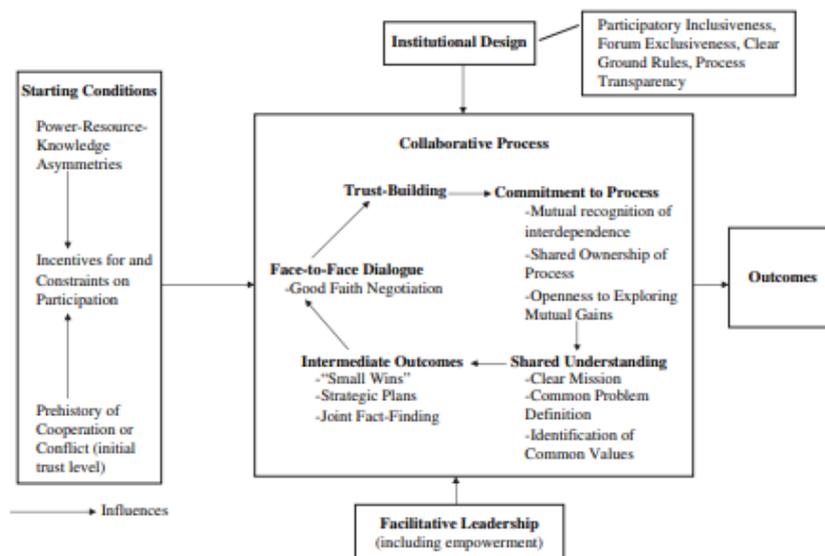
Abidin dkk (2013:10) dikutip dalam (Ikram, 2021) terdapat 3 aktor yang terlibat dalam pemangku utama pada proses *Collaborative Governance*. 3 dari aktor tersebut yakni terdapat Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam proses implementasi pemerintah. Pemerintah bukan lagi pelaku utama tapi butuh aktor lain karena kapasitas pemerintah yang terbatas. Sektor swasta dan dukungan keuangannya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih lanjut menurut Bingham (Blomgren Bingham, 2010) "*Collaborative means to co-labor to achieve common goals working across boundaries and multiactor relationships*". Menurut Bingham *Collaborative Governance* menggambarkan bahwa terdapat makna Collaborative yang melibatkan beberapa aktor yang ikut serta membantu satu sama lain dalam mencapai tujuan tertentu, aktor-aktor ini mampu bekerja tidak hanya dalam satu sektor akan tetapi dapat melibatkan beberapa sektor. Maka dari itu, *Collaborative Governance* adalah sebuah sistem pemerintahan dengan menggunakan metode kolaborasi yang melibatkan beberapa aktor dalam mewujudkan tujuan bersama.

Menurut (Kirk Emerson, Tina Nabatchi, 2011) terdapat beberapa dimensi

dalam melakukan *Collaborative Governance* yaitu:

1. Dimensi pertama merupakan ruang lingkup atau *system context* yang menaungi, hal ini menjelaskan terdapat beberapa penyelenggara seperti politik, hukum, sosial, ekonomi, lingkungan serta pengaruh lain yang berdampak pada kolaborasi.
2. Dimensi yang kedua merupakan bagian konsep *Collaborative Governance* yang terdiri dari dinamika kolaborasi dan aksi kolaborasi.
3. Dimensi ketiga terdapat dinamika kolaborasi yang terdapat elemen dasar serta memiliki 3 komponen dasar seperti keterlibatan dalam berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama.



Gambar 1.1. Model Collaborative Governance Ansell dan Gash

Sumber: Journal of Public Administration Research and Theory
<https://www.jstor.org/stable/25096384>

Menurut Ansell and Gash (Chris Ansell, 2007) berpendapat bahwa terdapat lima indikator dalam proses dari *Collaborative Governance* yang dikolaborasikan

antara pemerintah, swasta dan masyarakat, diantaranya:

1. *Face to face dialogue* (dialog tatap muka)

Pada tahap ini para aktor *stakeholder* yang terlibat dapat mewujudkan sebuah kepercayaan, saling menghormati, kesepahaman bersama, serta komitmen terhadap suatu proses kolaborasi yang akan dikembangkan. Dengan adanya dialog tatap muka ini merupakan aspek yang sangat penting dalam membangun sebuah kolaborasi, tanpa dibangunnya sebuah dialog tatap muka pada sebuah awal dari proses kolaborasi maka akan memicu sebuah dinamika atau permasalahan dalam sebuah kolaborasi.

2. *Trust Building* (membangun kepercayaan)

Pada tahap ini dalam membangun sebuah kepercayaan merupakan elemen penting dalam terjadinya proses kolaborasi, maka dari itu dalam membangun sebuah kepercayaan pada masing-masing *stakeholders* yang terlibat pada kolaborasi merupakan hal yang sangat penting.

3. *Commitment to The Process* (komitmen terhadap proses)

Pada tahap ini komitmen *stakeholders* terhadap proses adalah cara terbaik untuk keberhasilan suatu kebijakan dalam kolaborasi. Dalam sebuah komitmen ini membutuhkan suatu tahapan yang jelas, adil, dan transparan dari masing-masing aktor yang terlibat.

4. *Shared Understanding* (saling memahami)

Pada tahap ini saling memahami antara *stakeholders* merupakan sebuah proses kenyamanan dalam memahami terkait suatu pengetahuan yang akan diperlukan dalam menyelesaikan suatu persoalan yang dihadapi.

5. *Intermediate Outcome* (hasil akhir yang dicapai)

Pada tahap terakhir yaitu hasil akhir yang dicapai merupakan suatu kesepakatan pada hasil akhir yang ingin tercapai dalam sebuah kolaborasi, dimulai dari perencanaan, perancangan, pembangunan, hingga pengimplementasian dapat membangun komitmen yang dilakukan oleh aktor yang terlibat dalam menyelesaikan sebuah kebijakan.

1.6.2. Stunting

(RI, 2018) Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia stunting adalah kurangnya gizi kronis yang karena adanya asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama yang mengakibatkan adanya gangguan pada pertumbuhan anak berupa tinggi badan anak yang kurang dan berat badan anak lebih rendah yang tidak sesuai dengan usianya. Dengan adanya dampak buruk yang disebabkan oleh balita penderita stunting. Terdapat upaya pencegahan stunting yang menjadi fokus paling penting sejak dini, karena dampak dari stunting itu sendiri berjangka panjang yang akan menghambat pada pertumbuhan dan perkembangan seorang anak sehingga menurunnya produktivitas pada pertumbuhan saat dewasa (Syahida & Daliman, 2022).

Selain itu (Sandjojo, 2017) mengungkapkan bahwa stunting adalah masalah yang terdapat pada gizi yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat dari asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi pada saat janin berada dalam kandungan dan akan berdampak pada anak yang berusia dua tahun. Terdapat dua perbedaan dalam proses kejadian stunting pada kelompok usia anak. Untuk anak usia dibawah 2-3 tahun,

menggambarkan proses gagalnya proses pertumbuhan yang sedang berlangsung. Lalu untuk anak yang berusia diatas 3 tahun, mendeksripsikan dimana anak telah mengalami kegagalan pertumbuhan atau stunting. (Rachman, 2018)

Beberapa ahli menurut Wamani (Veratamala, 2017) berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak atau balita mengalami stunting seperti berat badan saat lahir rendah, stimulasi atau pola asuh pada anak kurang dalam asupan nutrisi serya infeksi berulang yang timbul dari faktor lingkungan. Dalam proses stunting diperlukan perlu peran dari semua *stakeholders* dan tatanan masyarakat. Pada 1000 hari pertama kehidupan nutrisi pada balita harus dijaga dengan baik serta faktor yang disebabkan dari luar pun sangat mempengaruhi terjadinya stunting. Seribu hari pertama dalam kehidupan adalah pembuahan/hamil ditambah usia 2 tahun.

Menurut WHO terdapat berbagai faktor yang menyebabkan stunting, penyebab tersebut terbagi dalam empat kategori:

1. Faktor Keluarga dan Rumah Tangga

- a. Faktor maternal merupakan sebuah nutrisi yang kurang pada saat prekonsepsi, kehamilan dan laktasi tinggi badan ibu yang rendah, infeksi, kehamilan pada usia remaja (dini), kesehatan mental, Intrauterine Growth Restriction (IUGR) dan kelahiran oreterm, jarak kelahiran yang pendek, dan hiertensi.
- b. Faktor lingkungan Keluarga Stimulasi dan aktivitas anak yang tidak kuat, perawatan yang buruk, sanitasi dan suplai air yang kuat, makanan yang tidak terjaga, jumlah makanan yang kurang, pengetahuan dalam pola asuh yang

rendah.

2. Faktor Makanan Tambahan/Komplementer yang kuat

a. Terdapat kualitas makanan yang buruk

Kualitas makanan akan menentukan nutrisi yang dikandungnya dan di serap tubuh, kualitas makanan yang buruk meliputi:

- 1) Kualitas zat mikronutrin yang rendah
- 2) Rendahnya konsumsi makanan beranekaragam
- 3) Protein hewani kadar anti nutrient
- 4) Kadar energi yang rendah pada makanan tambahan

b. Praktik pemberian makanan yang tidak kuat

Termasuk jumlah asupan makanan selama dan setelah sakit, makanan konsistensi, kualitas makanan yang menurun dan susah makan.

c. Makanan yang tidak aman

Terdapat makanan dan minuman yang terkontaminasi, PHBS yang buruk, penyimpanan dan persiapan makanan yang tidak aman.

3. Faktor menyusui

Meliputi penundaan IMD, tidak ASI Eksklusif dan penyapihkan kurang 2 tahun.

4. Faktor Infeksi

Meliputi infeksi diare, enteropati dilingkungan, berkurangnya nafsu makan karena infeksi infeksi pernafasan, malaria dan inflamasi.

1.6.3. *Penta Helix*

Pentahelix merupakan sebuah pengembangan dari *Triple Helix* dengan pemangku kepentingan seperti Akademisi, Bisnis, dan Pemerintah yang kemudian

di kembangkan menjadi *Pentahelix* dengan menambah beberapa pemangku seperti Pemerintah, Akademisi, Komunitas, Masyarakat dan Media untuk menciptakan sebuah kolaborasi dengan harapan keuntungan bersama. (Etzkowitz, 1995) model *triple helix* disini pertama kali di kenalkan Oleh Etzkowitz dan Leydesdorff dengan mempunyai beberapa unsur yang terdiri dari Pemerintah, Akademisi, dan *Government*.

Menurut (Lindmark: 2009) *Penta Helix* disini merupakan sebuah model yang melibatkan beberapa kepentingan baik itu dari lembaga pemerintah atau *non-profit* untuk menciptakan sebuah inovasi melalui kerja sama dengan dukungan dari beberapa sumber daya yang bermacam-macam.

Tabel 1.3. Unsur *Triple Helix*, *Quadruple Helix*, dan *Penta Helix*

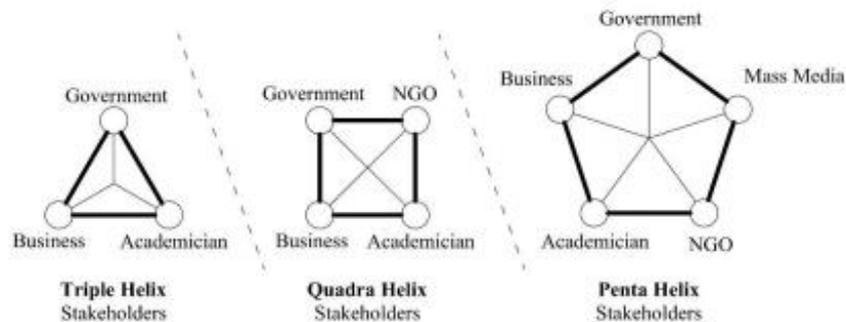
<i>Triple Helix</i>	<i>Quadruple Helix</i>	<i>Penta Helix</i>
Pemerintah	Pemerintah	Pemerintah
Bisnis	Bisnis	Dunia Usaha (<i>Business</i>)
Akademisi	Akademisi	Akademisi
	Organisasi Non Pemerintah	Organisasi Non Pemerintah
		Media Massa

Sumber: *Collaborative Governance* dalam Administrasi Publik
Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, Abd. Rachim

Berdasarkan tabel diatas, terdapat beberapa perluasan pemangku kepentingan dari *Triple Helix*, *Quadruple Helix*, dan *Penta Helix* dengan menambahkan beberapa unsur seperti pada *Quadruple Helix* menambahkan organisasi non pemerintah atau masyarakat, dan pada *Penta Helix* menambahkan media massa.

Model *Penta Helix* memang mempunyai fungsi yang sangat berguna untuk menyelesaikan suatu permasalahan dimana terdapat pemangku kepentingan dapat

mewakili berbagai kepentingan ada satu lokasi. (Sturesson, Lindmark, dan Roos:2009) sebuah kolaborasi dengan menggabungkan 5 (lima) pemangku dapat mewujudkan sebuah kebijakan dengan dukungan interaksi dari beberapa sumber daya secara optimal.



Gambar 1.2. Pemangku Kepentingan Triple Heli, Quadra Helix, dan Penta Helix

Sumber : *Collaborative Governance* dalam Administrasi Publik
Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, Abd. Rachim

Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam konsep *Penta Helix* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintah

Unsur dari pemerintah ini berisi organisasi budaya yang di danai publik, parlemen, kepolisian, militer, rumah sakit dan layanan publik lainnya. Pada tingkat nasional ada pemerintah nasional dan badan-badan nasional yang relevan.

2. Akademisi

Unsur dari akademisi ini dapat memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai untuk pengembangan pada suatu kebijakan, baik itu dari keahlian pengetahuan dari kesehatan, ilmuwan, dokter, geografi, pendidik, arsitek, serta administrasi publik. Selain itu berisi praktisi dari nasional maupun internasional

yang dapat berkontribusi melalui pengetahuan dan pengalaman, seperti organisasi penelitian, advokasi atau konsultan biasanya sering mengungkapkan sebuah pendapat yang lebih kuat dan relevan terhadap suatu masalah.

3. Bisnis

Unsur dari dunia usaha atau bisnis adalah perwakilan dari beberapa unsur seperti koperasi, pengacara, akuntan atau profesi lainnya baik nasional maupun internasional. Unsur bisnis disini lebih berperan pada memberi baik itu dalam bentuk jasa, nominal dan bentuk lainnya. Dengan tujuan untuk membawa perkembangan yang baik kepada profesinya.

4. Organisasi Non Pemerintah/komunitas

Unsur dari organisasi ini berupa non pemerintah baik itu secara sukarela memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat umum dengan tidak memperoleh keuntungan dari organisasi tersebut. Organisasi disini biasanya lebih menjaga perilaku dengan memiliki adab, kesopanan, budaya, keramahan dalam lingkungannya dengan menjaga hubungan yang harmoni dengan masyarakat dan mampu menghargai dari setiap masing-masing individu.

Organisasi disini lebih berdasar kepada pengabdian kepada masyarakat dengan mempunyai hak masing-masing tetapi dengan kapasitas yang sama.

5. Media Massa

Media massa disini berisi semua media baik dari bentuk digital maupun bukan. Dengan harapan akan diketahui oleh masyarakat luas melalui media yang dimilikinya tersebut.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Collaborative Governance

Dari seluruh pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* adalah sebuah konsep dimana menyatukan pemangku kepentingan umum dan swasta dengan melakukan kerjasama dengan para *stakeholder* yang terlibat dengan proses tertentu yang mempunyai komitmen dan tanggung jawab, visi dan misi yang sama, keberhasilan bersama.

1.7.2 Stunting

Dari seluruh pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa stunting adalah suatu kondisi pertumbuhan yang gagal pada balita, yang diakibatkan kekurangan gizi kronis yang menyebabkan anak mengalami pertumbuhan yang tidak sesuai dengan usianya. Selain itu, anak yang menderita stunting akan sangat berpengaruh kepada kesehatan, pendidikannya dan kegiatan produktifitasnya pada saat dewasa. Penderita balita stunting akan sulit mencapai pertumbuhan yang sesuai dengan usianya serta akan berpengaruh juga pada pertumbuhan dan perkembangan yang baik maupun secara fisik dan motorik.

1.7.3 Penta Helix

Dari seluruh pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa *Penta Helix* merupakan sebuah model yang melibatkan beberapa kepentingan baik itu dari lembaga pemerintah atau *non-profit* untuk menciptakan sebuah inovasi melalui kerja sama dengan dukungan dari beberapa sumber daya yang bermacam-macam yang berisi Pemerintah, Bisnis, Akademisi, Organisasi Non Pemerintah, dan Media Massa.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini diolah dari berbagai ahli, sumber dan penelitian terdahulu. Sebagai definisi operasional, peneliti mengkaji mengenai *collaborative governance* dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman pada tahun 2022. Secara khusus, peneliti akan menggunakan indikator dari proses *collaborative governance* dikemukakan Ansell and Gash (2007:228) yakni *face to face, trust building, commitmen to the process, shared understanding, intermediate outcome*. Indikator yang digunakan dalam penelitian yaitu:

Tabel 1.4 Definisi Oprasional Proses *Collaborative Governance*

VARIABLE	INDIKATOR
Proses Collaborative Governance	1. Face to face (dialog tatap muka)
	2. Trust Building (membangun kepercayaan)
	3. Commitmen to the process (komitmen terhadap proses)
	4. Shared understanding (berbagi kesepahaman)
	5. Intermediate outcome (tujuan jangka panjang)

1.9 Metodologi Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah, metode pada dasarnya berarti cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati. Oleh karena itu, tujuan penelitian umum adalah mengungkapkan masalah, kemudian langkah-langkahnya yang akan diambil harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis

kualitatif deskriptif. Menurut Indriantoro dan Supomo (2012:26) penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah yang berupa fakta-fakta yang terjadi dalam suatu popularisasi yang terjadi pada saat ini.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena peneliti ingin melihat bagaimana proses kolaborasi dalam *Collaborative Governance* dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman.

1.9.3 Jenis Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut (Sugiyon: 20008) menjelaskan bahwa data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang diperoleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai objek penelitian.

Penggunaan data primer dalam penelitian ini yaitu sumber data yang diperoleh pada pelaku utama yang memiliki informasi pertama tentang pencegahan dan penanggulangan stunting melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer merupakan sumber informasi mengenai konsep penelitian yang dapat diperoleh secara langsung dari unit Analisa yang dijadikan sebagai objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah informasi yang dapat diperoleh oleh semua peneliti yang dilakukan secara tidak langsung baik melalui dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian yang ada didalam unit Analisa yang dijadikan sebagai objek penelitian. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya.

Data sekunder disini berfungsi untuk menerima semua informasi yang peneliti peroleh yang tidak secara langsung, baik itu melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) didalam unit Analisa yang dijadikan sebagai objek penelitian

Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini melalui dokumen yang berbentuk paper atau dari web resmi dari Pemerintah Kabupaten Sleman yang melampirkan bagaimana strategi pencegahan dan penanggulangan stunting serta data angka stunting yang terjadi di Kabupaten Sleman.

Adapun subjek utama pada penelitian ini adalah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan di Kabupaten Sleman, serta di dukung oleh informan lain seperti PKK, Karang Taruna dan masyarakat yang terlibat. Objek penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Sleman.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan maksud dan tujuan pada penelitian untuk memperoleh hasil data yang diperlukan. Data penelitian ini dikumpulkan melalui:

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) Observasi adalah teknik pengumpulan data yang memiliki ciri-ciri khusus ketika dibandingkan dengan teknik lainnya. Pengamatan juga tidak terbatas tetapi bisa melalui objek lainnya. Melalui observasi, peneliti dapat mempelajari tentang perilaku yang dimaksud. Pengamatan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi langsung dilapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan informasi yang akurat melalui komunikasi dua arah untuk mendapatkan informasi terkait dengan penelitian. Menurut Yusuf (2014:372) Wawancara adalah sebuah proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung atau bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti. Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara yang dilakukan secara bebas dan terarah.

Aktor utama dalam wawancara ini adalah pemerintah yang mempunyai peran penting dalam kolaborasi yaitu Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

Tabel 1.5. Informan

No	Informan	Tema Wawancara
1.	Rendy Surya sebagai staff bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman	<i>Collaborative Governance</i> dalam pencegahan dan penanggulang stunting serta regulasi yang ditetapkan dan implementasinya
2.	Sigit indarto, SE, M.SI sebagai Kepala Bidang Perlindungan	<i>Collaborative Governance</i> dalam pencegahan dan penanggulang

No	Informan	Tema Wawancara
	dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman	stunting dan apa saja anggaran yang dikeluarkan
3.	Sekti Riyantina, S.Tr.Gz sebagai konseling Bidang Poli Gizi Puskesmas Gamping 1	<i>Collaborative Governance</i> dalam pencegahan dan penanggulang stunting Kabupaten Sleman
4.	Heribertus Riswidodo, SE, M.SE sebagai Kepala Bidang Bappeda Kabupaten Sleman	<i>Collaborative Governance</i> dalam pencegahan dan penanggulang stunting Kabupaten Sleman
5.	Samsul Eko sebagai Kepala Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman	<i>Collaborative Governance</i> dalam pencegahan dan penanggulang stunting Kabupaten Sleman
6.	Sri Mujiyanto sebagai Ketua DPC Sleman (Anggota PER-SAGI)	<i>Collaborative Governance</i> dalam pencegahan dan penanggulang stunting Kabupaten Sleman
7.	Joko Dwi Haryadi sebagai Analis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	<i>Collaborative Governance</i> dalam pencegahan dan penanggulang stunting Kabupaten Sleman
8.	Sarjila sebagai Kader PKK	<i>Collaborative Governance</i> dalam pencegahan dan penanggulang stunting Kabupaten Sleman

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap penggunaan metode observasi dan wawancara sehingga akan lebih efektif dipercaya atau memiliki tanggung jawab yang tinggi jika didukung oleh foto atau karya tulis yang mendukung. Lalu dokumentasi pun sangat penting karena terdapat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder berupa dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian. Metode dokumentasi adalah

pengumpulan data dari data yang telah didokumentasikan dalam berbagai bentuk. (Yani:2016)

1.9.5 Analisis Data

Analisis Data adalah bagian terpenting dalam sebuah penelitian dengan menggunakan cara analisis ilmiah manfaat dari sebuah data pasti yang akan tampak, dalam memecahkan masalah penelitian dan merupakan tujuan akhir dari jawaban penelitian. Analisis data tersebut diantaranya:

1. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan kegiatan memilih hal-hal pokok serta merangkum dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting, lalu mencari tema dan polanya. Data yang sudah direduksi atau dipilih akan lebih memperlihatkan gambaran yang jelas yang nantinya akan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Dalam penelitian apabila terdapat temuan yang dilihat asing, atau tidak dikenal serta belum memiliki pola yang jelas, hal itu akan menjadi perhatian lebih karena pada dasarnya penelitian dengan menggunakan metode kualitatif mempunyai tujuan untuk mencari pola dan makna yang belum terjawab dibalik pola dan data yang sebelumnya ada dan nampak. Apabila dalam penelitian terdapat penelitian kuantitatif akan lebih baik jika data yang berupa angka sebaiknya jangan dipisahkan dari kata yang kontekstual sehingga tidak akan mengurangi makna dari data tersebut.

2. Penyajian Data

Setelah data dari penelitian sudah di reduksi yang pola penelitiannya sudah jelas, untuk selanjutnya melakukan penyajian data, penyajian data adalah kumpulan informasi yang sudah tersusun yang sudah tertuju yang akan memungkinkan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data digunakan untuk meningkatkan pemahaman pada sebuah kasus yang akan dijadikan sebagai acuan dalam mengambil tindakan yang berdasarkan pemahaman dan analisis pada penyajian data.

Dalam data penelitian dapat disajikan dalam bentuk uraian yang didukung oleh matriks jaringan kerja. Penyajian data disini merupakan penguatan data dalam bentuk matriks, network, chart ataupun grafik, agar peneliti dapat menguasai data dan tidak akan terkecoh dengan beberapa data lainnya

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam sebuah penelitian, penarikan kesimpulan disini adalah hasil dari penelitian menjawab pada rumusan penelitian yang berfokus berdasar kepada hasil analisis data yang sudah di dapatkan. Penarikan kesimpulan ditampilkan dalam bentuk deskriptif objektif yang berpedoman pada kajian penelitian. Akan tetapi pada awalnya kesimpulan itu kabur dan akan tetapi disamping itu akan semakin jelas terjawab karena data-data yang diperoleh semakin mendukung.